

IMPLEMENTASI DANA KOMITE SEKOLAH, BOSNAS DAN BOSDA TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Putri Nadia¹

putrinadia.student@umitra.ac.id

Amelia Anwar²

ameliaanwar@umitra.ac.id

Nety Kumalasari³

nety@umitra.ac.id

Universitas Mitra Indonesia¹⁻³

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the impact of the implementation of the School Committee Fund Policy, the National School Assistance Fund (BOSNAS), and the Regional School Assistance Fund (BOSDA) on improving the quality of education. The data used in this study are primary data and secondary data. This means that data is obtained directly from the source by respondents who complete the survey. The analysis technique used is plausibility, reliability, classical assumptions, hypotheses, and multiple linear regression. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of the school committee's funding policy, the School Operational Assistance Fund (BOSNAS), and the Regional School Operational Assistance Fund (BOSDA) will have an important plus at the same time. The effect of improving the quality of education and some of each dependent variable has a significant positive effect on improving the quality of education. Therefore, in order to improve the quality of education at SMAN 10 Bandar Lampung, the guidelines for the Policy on School Committee Funds, National School Assistance Funds (BOSNAS) and Regional School Assistance Funds (BOSDA) must be considered or adhered to. in accordance with the laws and regulations;

Keywords: *Committee Fund, BOSNAS Fund, BOSDA Fund, Education Quality.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan Kebijakan Dana Komite Sekolah, Dana Bantuan Sekolah Nasional (BOSNAS), dan Dana Bantuan Sekolah Daerah (BOSDA) terhadap peningkatan mutu pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Artinya, data diperoleh langsung dari sumbernya oleh responden yang menyelesaikan survei. Teknik analisis yang digunakan adalah plausibility, reliabilitas, asumsi klasik, hipotesis, dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dana Komite sekolah, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSNAS), dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) Daerah akan memiliki nilai plus yang penting sekaligus. waktu. Pengaruh peningkatan mutu pendidikan dan sebagian masing-masing variabel terikat berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SMAN 10 Bandar Lampung, pedoman Kebijakan Dana Komite Sekolah, Dana Bantuan Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Sekolah Daerah (BOSDA) harus diperhatikan atau dipatuhi. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Kata Kunci: Dana Komite, Dana BOSNAS, Dana BOSDA, Mutu Pendidikan.

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia yaitu Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan dalam memberikan pendidikan serta pengetahuan baik secara umum maupun akademik, pengajaran keterampilan, dan pendidikan terkait perilaku peserta didik. Sistem Pendidikan Nasional menggunakan kurikulum 2013 (K13) yang memiliki aspek – aspek dalam penilaian terkait bagaimana siswa berperilaku dalam masyarakat, cara bersikap sesuai norma, dan memberikan pengetahuan serta wawasan bagi peserta didik.

Perkembangan pendidikan Provinsi Lampung masih mengalami kesulitan. Pada era pandemic Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi pendidikan di sekolah yang dimana siswa di tuntut harus mandiri dalam melaksanakan proses pembelajaran karena terbatasnya interaksi pendidik dengan peserta didik. Pada masa inilah siswa melakukan pembelajaran dari rumah yang menggunakan media elektronik (Daring). Hal ini dimaksudkan guna mengurangi penyebaran wabah virus corona tanpa mengurangi kualitas pendidikan bagi siswa. Proses pembelajaran tetap dilakukan, penerapan ini merupakan konsekuensi logis agar kegiatan belajar tetap berjalan sebagaimana mestinya.

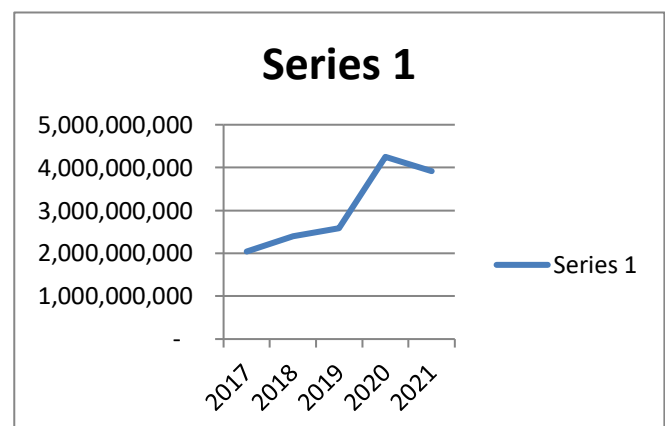
Dalam kegiatannya, pendidikan di SMA Negeri 10 Bandar Lampung menerapkan Sistem Pendidikan Nasional yang menggunakan aturan serta arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Kurikulum 13 (K13). SMA Negeri 10 Bandar Lampung unggul dalam prestasi bersifat akademis dan non akademis, dimana para murid aktif dalam kegiatan belajar yang disesuaikan bakat dan minatnya masing-masing.

Pendidikan yang dilakukan di SMA Negeri 10 mampu bersaing di era 5.0 yang diantaranya pendidik meminimalkan peran sebagai *learning material provider*, pendidik menjadi inspirasi bagi tumbuhnya jiwa kreatif dan inovatif peserta didik. Pendidik berperan penting sebagai fasilitator, tutor, penginspirasi yang memotivasi peserta didik untuk bias Merdeka Belajar

Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan, SMA Negeri 10 Bandar Lampung menerapkan berbagai strategi baik bagi peserta didik mau-

pun staff pendidik. Dalam usahanya tersebut, dilakukan rapat dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil pendidikan, serta memutuskan langkah berikutnya yang diharapkan mampu menunjang kegiatan belajar mengajar. Rapat tersebut dihadiri oleh guru pembimbing serta staff pendidik yang saling memberikan masukan maupun kritik yang dapat membangun bersama demi tercapainya tujuan bersama terkait upaya peningkatan mutu pendidikan. Meningkatkan kualitas guru serta kualitas para siswa baik dari segi sikap maupun pengetahuan agar tercapainya upaya-upaya yang dilakukan sekolah merupakan suatu keharusan demi menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni. Hal tersebut juga harus ditunjang dengan sarana yang memadai guna terciptanya pembelajaran yang aman dan nyaman bagi siswa dan guru serta staf tata usaha.

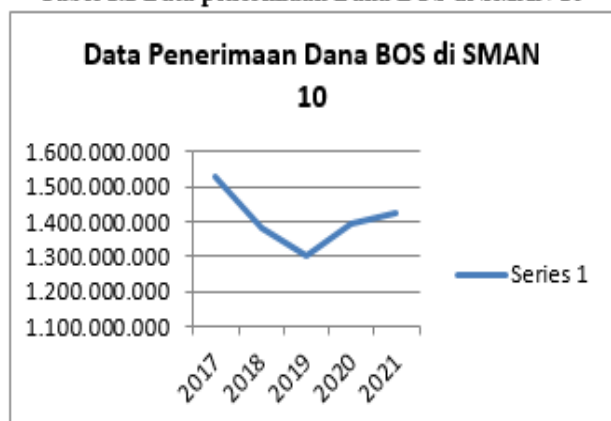
Grafik 1.1 Data penerimaan Dana Komite di SMAN 10



Sumber: SMA Negeri 10 Bandar Lampung

Grafik tersebut merupakan data penerimaan Grafik di atas merupakan data penerimaan dana Komite di SMAN 10 Bandar Lampung guna mendukung pembiayaan kegiatan sekolah sesuai anjuran pemerintah serta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Ditilik dari grafik tersebut, terjadi kenaikan dan penurunan penerimaan yang di sebabkan oleh banyak nya siswa yang di terima di SMAN 10 sesuai dengan kuota pagu yang di tetapkan oleh sekolah sesuai daya tampung kemampuan sarana dan prasana sekolah. Dan di pengaruhi juga dengan banyaknya penerimaan pembayaran dari wali murid.

Tabel 1.2 Data penerimaan Dana BOS di SMAN 10



Grafik di atas merupakan data penerimaan dana BOS di SMAN 10 Bandar Lampung untuk menunjang pembiayaan kegiatan sekolah. Diketahui berdasar grafik tersebut, terjadi kenaikan dan penurunan penerimaan yang disebabkan oleh banyak nya siswa yang diterima di SMAN 10 sesuai dengan kuota pagu yang ditetapkan oleh sekolah sesuai daya tampung kemampuan sarana dan prasarana sekolah.

Dana BOSDA di SMA Negeri 10 Bandar Lampung merupakan program pemerintah daerah provinsi Lampung yang penggunaannya untuk menyesuaikan dengan dana BOSNAS. Dana BOSDA di anggarakan untuk membantu operasional sekolah yang tidak termasuk dalam dana BOSNAS. Penggunaan dana BOSDA di SMA Negeri 10 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Dengan terealisasinya Dana BOSDA yang digelontorkan oleh aparaturnya daerah, instansi pendidikan mengharapkan pembiayaan operasional dalam kegiatan pendidikan yang sejauh ini didanai dana BOS Nasional, bisa terlaksana lebih optimal mengingat terdapatnya dana segar untuk menunjang proses pembelajaran, terutama bagi siswa yang kesulitan dalam biaya sekolah sehingga terwujudnya pendidikan yang bermutu guna tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas di provinsi Lampung.

STUDI PUSTAKA

Pengertian Dana Komite Sekolah

Terkait biaya pendidikan, terdapat biaya yang disebut Pungutan Pendidikan. Yang dimaksud pungutan ini sendiri adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh wali murid kepada pihak sekolah guna menunjang proses pembelajaran, yang diwajibkan, mengikat dan terkait jumlah maupun waktu penyerahannya telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Selain itu juga terdapat biaya sumbangan, Sumbangan Pendidikan disini adalah sesuatu yang diberikan secara sukarela oleh wali murid kepada pihak sekolah yang diharapkan mampu menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat berupa uang/barang/jasa. Sumbangan ini dapat diserahkan secara individu atau berkelompok, masyarakat maupun lembaga atau organisasi lain yang tidak mengikat satuan pendidikan dikarenakan bersifat suka rela.

Tugas Komite Sekolah

Untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri nomor 75 tahun 2016, Komite Sekolah bertanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan Pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pendidikan yang tepat.
 - Kebijakan dan program sekolah.
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS).
 - Standar kinerja sekolah.
 - Standar lembaga pendidikan di sekolah;
 - Standar kerjasama sekolah dengan pihak lain.
- Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, individu/organisasi/usaha/industri dan pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.
- Pengawasan pelayanan pendidikan di sekolah sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- melacak keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari siswa, orang tua, masyarakat, dan pengamatan dewan sekolah terhadap kinerja sekolah.

Sumber Pendanaan Pendidikan / Komite Sekolah

Sumber pendanaan Satuan Pendidikan adalah:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Sumbangan dari orangtua siswa atau walinya yang sah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Sumbangan dari afiliasi Satuan Pendidikan di selain siswa atau orang tua/walinya
- d. Sumber informasi legal dan tidak mengikat lainnya.

Indikator Pendanaan Pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Asas musyawarah mufakat bahwa hasil musyawarah mufakat antara sekolah dengan orang tua siswa dijadikan dasar dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Asas akuntabilitas adalah bahwa sekolah bertanggung jawab atas pemberian sumbangan orang tua/wali siswa sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3. Asas keadilan menyatakan bahwa dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pada suatu satuan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan orang tua/wali siswa.
4. Asas kecukupan menyatakan bahwa penentuan sejauh mana keterlibatan orang tua siswa dalam pembiayaan suatu satuan pendidikan harus didasarkan pada kecukupan kebutuhan akan penyediaan layanan pendidikan.
5. Asas keterbukaan adalah penentuan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pada suatu satuan pendidikan harus didasarkan pada analisis kebutuhan sekolah yang dikomunikasikan secara terbuka kepada orang tua siswa. didik.
6. Asas tidak mengikat tidak memperbolehkan/memerlukan sumbangan dari pihak ketiga untuk membentuk ikrar yang dapat merugikan kepentingan sekolah dan siswa.

7. Prinsip kemanfaatan menyatakan bahwa kontribusi dari pihak ketiga harus digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah

Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS)

Dana BOS ialah dana yang ditujukan untuk pembiayaan keperluan nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah selaku agen penggerak program wajib belajar. Dana ini juga dapat digunakan dalam kegiatan lain asalkan masih dalam lingkup pendidikan serta tidak melanggar dari ketentuan pemerintah.

Penggunaan Dana BOS 2021 dilakukan sesuai aturan pemerintah, yang meliputi:

- 1) Seluruh biaya yang di keluarkan dalam rangka kegiatan penerimaan siswa baru
- 2) Biaya dalam rangka mengembangkan perpustakaan,
- 3) pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan lain seperti: membeli disinfektan dan masker
- 4) pembayaran langganan layanan daya dan jasa,
- 5) pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan
- 6) pembayaran honorarium/gaji guru honor.

Syarat dan Kriteria Sekolah yang Mendapatkan Dana BOS

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan No. 8 Tahun 2020 syarat dan kriteria pencairan dana BOS adalah sebagai berikut:

1. Sekolah terdaftar pada aplikasi dapodik ketika batas waktu dilakukan
2. Sekolah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
3. Satuan pendidikan bukan termasuk ke dalam Satuan Pendidikan Kerjasama.
4. Selama tiga tahun sekolah memiliki jumlah siswa yang terdaftar sejumlah lebih atau sama dengan 60 siswa.
5. Untuk sekolah swasta memiliki surat izin operasional.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Untuk membantu sekolah menyelesaikan pendanaan BOS nasional untuk pendanaan pendidikan menengah dengan diadakan nya BOSDA untuk menyediakan dana. Jumlah siswa yang dibebaskan dari pembayaran SPP akan menjadi kebijakan sekolah (opsional), dengan mempertimbangkan jumlah siswa yang tidak mampu membayar dan besarnya SPP. Dana bantuan operasional daerah diberikan kepada sekolah dengan jumlah Rp. 1.000.000/siswa sesuai dengan data siswa pengajuan yang dilakukan oleh sekolah kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Program BOS daerah di SMA dan SMK negeri dan swasta dimaksudkan untuk membantu mendanai pendidikan di sekolah sebagai bagian dari program sekolah menengah yang berkualitas. Program BOS daerah SMA dan SMK memiliki tujuan antara lain:

1. Menopang pengeluaran sekolah.
2. Memajukan mutu pendidikan negeri atau swasta.
3. Memberi peluang yang sama kepada siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Ketentuan Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Dana BOSDA

Pergub nomor 34 Tahun 2020 yang mengatur tentang ketentuan dan mekanisme penyaluran Dana BOSDA Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung adalah:

- a. Satuan pendidikan menyampaikan proposal yang berisi :
 1. Informasi data tentang jumlah siswa
 2. Jumlah siswa tidak mampu
 3. keputusan yang di tanda tangani Kepala Sekolah tentang siswa penerima dana BOSDA.
 4. berita Acara Rapat Tim Verifikasi untuk sekolah swasta.
 5. fotocopi rekening sekolah
 6. Surat pernyataan bahwa siswa/orang tua tersebut dan/atau dapat dibebaskan dari biaya pendidikan.
 7. Siswa yang ditunjuk sebagai Penerima

Manfaat dan BOSDA atas perintah Kepala Sekolah tidak dipungut biaya administrasi pendidikan oleh Sekolah.

- b. Satuan Pendidikan mengajukan permohonan pembayaran BOSDA dengan lampiran berupa:
 1. Permohonan pembayaran dana BOSDA (Form 1).
 2. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Kelengkapan (Formulir 2)
 3. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (form 3).
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (formulir 4).
 5. Laporan Pembayaran Dana BOSDA (dibayarkan selama 2 semester).

Indikator Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan keuangan sekolah harus diperhatikan melalui sejumlah pedoman. Pasal 20, Pasal 48 UU 2003 menyebutkan bahwa penyelenggaraan biaya pendidikan didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, prinsip efektivitas juga harus ditekankan.

Tabel 2.2

Perbedaan Dana BOSNAS dan BOSDA

Perbedaan	BOSNAS	BOSDA
Sumber Dana	APBN	APBD
Rehabilitasi	Ringan dan Sedang	Ringan
Larangan	Di perbolehkan Membeli barang yang tidak mendukung proses pembelajaran	Tidak diperbolehkan Membeli barang yang tidak mendukung proses pembelajaran
	Diperbolehkan Membeli hadiah lomba/sertifikat/duplikat piala	Tidak diperbolehkan Membeli hadiah lomba/sertifikat/duplikat piala
	Diperbolehkan Bimbingan belajar/les yang bersifat rutin	Tidak diperbolehkan Bimbingan belajar/les yang bersifat rutin
	Diperbolehkan Pelatihan diklat yang diadakan di sekolah/madrasah	Tidak diperbolehkan Pelatihan diklat yang diadakan di sekolah/madrasah
	Diperbolehkan Konsumsi yang tidak tercantum dalam buku petunjuk teknis	Tidak diperbolehkan Konsumsi yang tidak tercantum dalam buku petunjuk teknis
Dana	Rp. 1.500.000/Siswa	Rp. 1.000.000/Siswa

Mutu Pendidikan

Baharun, 2017;98 menyatakan bahwa mutu pendidikan didefinisikan sebagai efektivitas pendidikan untuk menghasilkan keunggulan dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler siswa yang telah lulus suatu jenjang pendidikan tertentu atau menyatakan telah menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu. menyatakan bahwa itu adalah tingkat keunggulan dalam mengelola secara efektif dan efisien.

Standar Mutu Pendidikan

Penyelenggaraan sistem mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP sendiri adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah di bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Penilaian
5. Standar Pendidik dan Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana,
8. Standar Pembiayaan

Karakteristik Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan umumnya diukur dari segi input, proses, output dan outcome. “Baharun, 2017:70 menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik yang digunakan oleh pelanggan atau pemangku kepentingan dalam menilai mutu.

1. Bukti langsung (tangibles), seperti fasilitas fisik, asset berwujud dan bahan habis pakai, pegawai dan sarana komunikasi.
2. Keandalan (reliability), kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan cepat dan memuaskan;
3. Daya tanggap (responsiveness), yakni keinginan pegawai untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap.

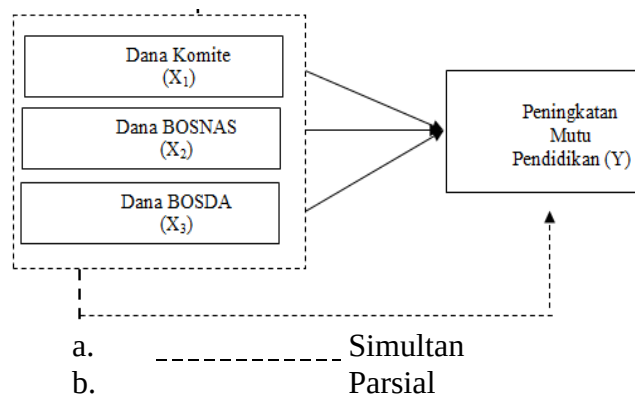
4. Jaminan (assurance), meliputi kompetensi pegawai, sopan santun dan dapat di percaya. bebas dari bahaya, resiko dan keraguan
5. Empati, Ini termasuk kemampuan untuk mengembangkan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dikatakan Sugiyono (2018) data kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan positivistic, yang berujud numeric yang selanjutnya diukur dengan statistik untuk pengujian penelitian yang berkenaan permasalahan yang diteliti lalu kemudian ditarik kesimpulan.

Gambar 3.1 Desain Penelitian



- a. Hubungan Implementasi Kebijakan Dana Komite Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan
Semakin tinggi pendapatan dana komite sekolah dan semakin baik penerapan kebijakan dana komite yang dilakukan maka dapat meningkatkan mutu pendidikan di suatu sekolah. Hal ini disebabkan karena jika kebijakan suatu aturan pada keuangan sekolah tidak di terapkan dengan baik maka akan mempengaruhi suatu proses pembelajaran di sekolah sehingga tidak dapat meningkatnya mutu pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Hubungan Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan
Semakin banyak siswa terdaftar di suatu sekolah maka semakin tinggi pula pendapatan pada program bantuan operasional sekolah

nasional (BOSNAS) di suatu sekolah sehingga dapat memperlancar kegiatan operasional sekolah. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah kurang maksimal apabila tidak di dukung dengan dana yang memadai. Tujuan dana BOSNAS yaitu untuk membantu pengeluaran operasional sekolah sehingga kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan lancar agar tercipta sekolah yang bermutu.

c. Hubungan Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

Semakin banyak dana BOSDA yang di dapat sekolah maka dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dengan adanya dana BOSDA ini dapat mengurangi angka siswa putus sekolah sehingga meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

d. Hubungan Implementasi Kebijakan Komite, Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan akan meningkat jika di dukung dengan beberapa aspek yaitu salah satu nya dana. Di suatu sekolah terdapat 3 dana keuangan yang pertama dana komite, dana BOSNAS dan dana BOSDA. Upaya upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan berbagai cara dalam meringankan biaya pendidikan, memperbaiki sarana dan prasarana, dalam hal prestasi akademik dan non akademik, memperlancar kegiatan kegiatan yang ada di sekolah. Hal tersebut di dukung dengan biaya biaya dan SDM yang memadai.

Populasi dan Sample

Jumlah Populasi yaitu 63 Guru (41 Perempuan dan 22 Laki-laki) 27 Tenaga Kependidikan (11 Perempuan dan 16 Laki-laki) dengan total seluruh 90 orang. Penulis menggunakan teknik sensus, yaitu mengambil 100% jumlah populasi dikarenakan populasi kurang dari 100, yaitu sebanyak 90 orang responden.

Variabel penelitian

1. Variabel bebas pada penelitian ini adalah:
X1:Implementasi Kebijakan Dana Komite
X2:Implementasi Kebijakan Dana BOSNAS
X3:Implementasi Kebijakan Dana BOSDA
2. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Peningkatan Mutu Pendidikan.

Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Dana Komite, Dana BOSNAS dan Dana BOSDA terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan
H₁ : Diduga terdapat pengaruh secara simultan Dana Komite, Dana BOSNAS, Dan Dana BOSDA terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan
2. Pengaruh Dana Komite terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan
H₂ : Diduga Dana Komite secara parsial berpengaruh terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan
3. Pengaruh Dana BOSNAS terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan
H₃ : Diduga terdapat pengaruh secara parsial Dana Komite terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan
4. Pengaruh Dana BOSDA terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan
H₄ : Diduga terdapat pengaruh secara parsial Dana BOSDA terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Uji Regresi Linier berganda

Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.579	7.297		.491
	Dana Komite	.191	.093	.191	.2054
	Dana BOSNAS	.372	.113	.314	.001
	Dana BOSDA	.321	.115	.266	.006

a. Dependent Variable: Mutu Pendidikan

Sumber: Data olahan IBM SPSS 22

Persamaan:

$$Y = 3,579 + 0,191X_1 + 0,372X_2 + 0,321X_3 + \varepsilon$$

Berlandaskan uraian diatas maka diinterpretasikan:

1. $\alpha = 3,579$ mengindikasikan bahwa ketiga variabel bebas tersebut Impelementasi Kebijakan Dana Komite, Impelementasi Kebijakan Dana BOSNAS dan Impelementasi Kebijakan Dana BOSDA di asumsikan konstanta atau sama besar adalah nol, maka peningkatan mutu pendidikan di sekolah Bandar Lampung akan meningkat sebesar 3,579
2. Untuk hasil nilai signifikan variabel X_1 (Impelementasi Kebijakan Dana Komite) 0,191 maka dari itu hipotesis diterima sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Variabel X_1 (Impelementasi Kebijakan Dana Komite) terdapat pengaruh positif dan signifikan dalam variabel Y (Peningkatan Mutu Pendidikan) hal ini berarti semakin meningkat Dana Komite maka akan berdampak pada Peningkatan Mutu Pendidikan. Contoh jika nilai Dana Komite sebesar 1 maka tingkat nilai Mutu Pendidikan sebesar 0,191 atau 19.1%.
3. Jika hasil nilai signifikan variabel X_2 (Impelementasi Kebijakan Dana BOSNAS) sebesar 0.372 maka dari itu hipotesis diterima dimana bisa disimpulkan bahwasanya Variabel X_2 (Impelementasi Kebijakan Dana BOSNAS) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Peningkatan Mutu Pendidikan). dengan begitu makin meningkat DANA BOSDA maka akan berdampak pada Peningkatan Mutu Pendidikan sebesar 0.372 atau 37,2%.
4. Jika hasil nilai signifikan variabel X_3 (Impelementasi Kebijakan Dana BOSDA) sebesar 0.321 maka dari itu hipotesis diterima dimana bisa disimpulkan bahwasanya Variabel X_3 (Dana BOSDA) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Peningkatan Mutu Pendidikan). dengan begitu makin meningkat Impelementasi Kebijakan Dana BOSDA maka akan berdampak pada Peningkatan Mutu Pendidikan sebesar 0.321 atau 32,2%.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.18 Hasil Perhitungan Uji R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.529 ^a	.280	.255	3.526

a. Predictors: (Constant), Dana BOSDA, Dana Komite, Dana BOSNAS

b. Dependent Variable: Mutu Pendidikan

Sumber: IBM SPSS

Berdasarkan output SPSS di atas, menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi ($Adj. R^2$) sebesar 0,255. Hal ini berarti Dana Komite, Dana BOSNAS dan Dana BOSDA berpengaruh terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan sebesar 25,5%, dan 74,5% selebihnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Tabel 4.19 Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	415.675	3	138.558	11.147	.000 ^b
	Residual	1068.947	86	12.430		
	Total	1484.622	89			

a. Dependent Variable: Mutu Pendidikan

b. Predictors: (Constant), Dana BOSDA, Dana Komite, Dana BOSNAS

Sumber: IBM SPSS

Variabel independen memiliki signifikansi $0,000 < 0,05$, kesimpulannya berpengaruh signifikan. Kemudian didapat F_{hitung} dari hasil pengujian statistik sebesar 11,147 dengan F_{tabel} sebesar 3,100. dari rumus $df_1 (k; n-k)$ dimana $k=2$ (jumlah variabel - 1), $n=90$, $\alpha = 0,05$ sehingga $df_1 (2; 90-2) = (2; 88) = 3,100$.

Jika diketahui bahwasannya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,147 > 3,100$) sehingga mengartikan Ada pengaruh positif yang signifikan secara simultan antara Dana Komite, Dana Bantuan Operasional

Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 10 Bandarlampung.

Uji Parsial

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.579	7.297		.491	.625
	Dana Komite	.191	.093	.191	2.054	.043
	Dana BOSNAS	.372	.113	.314	3.296	.001
	Dana BOSDA	.321	.115	.266	2.790	.006

a. Dependent Variable: Mutu Pendidikan

Sumber: IBM SPSS

Uji t dilakukan untuk mengetahui mana di antara tiga variabel independen yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Cara pengukurannya dengan membuat perbandingan t-hitung dan t-tabel.

1. Signifikansi variabel Implementasi Kebijakan Dana Komite (X1) adalah 0,043. Nilai Sig. 0,043<0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan variabel Implementasi Kebijakan Dana Komite (X1) terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan (Y).

Hasil thitung 2,054, dibandingkan dengan db = 86 (db = N – 4 untuk N =90) yaitu 1,663 taraf signifikan 5%, jadi t hitung > t tabel maka H2 diterima dan H0 di tolak. Maka ada pengaruh positif yang signifikan secara parsial antara Dana Komite terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 10 Bandarlampung

2. Bersumber dari hasil uji t, didapatkan t hitung sebesar 3,296 dan tingkat signifikan sebesar 0,001. Dilihat dari t tabel 1,663 dengan taraf signifikan 0,05 artinya t hitung > t tabel (3,296 > 1,663), signifikansi 0,001 < 0,05. Dengan kata lain menolak H0 dan Menerima H3. Maka kesimpulannya adalah ada pengaruh positif yang signifikan secara parsial antara Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 10 Bandar lampung.

3. Bersumber dari hasil uji t, didapatkan t hitung sebesar 2,790 dan tingkat signifikan sebesar 0,006. Dilihat dari t tabel 1,663 dengan taraf signifikan 0,05 artinya t hitung > t tabel (2,790 > 1,663) dan signifikansi 0,006 < 0,05. Dengan kata lain menolak H0 dan Menerima H4. Maka kesimpulannya adalah Ada pengaruh positif yang signifikan secara parsial antara Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 10 Bandar lampung.

Pembahasan

1. **Pengaruh Implementasi Kebijakan Dana Komite, Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 10 Bandar lampung.**

Berdasarkan hasil perhitungan uji F yang dilaksanakan maka di simpulkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan ketiga variabel X terhadap variabel Y. Yaitu bahwasannya $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H1 diterima yaitu terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Dana Komite, Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 10 Bandarlampung. Maka dari itu semakin baik penerapan kebijakan dari ketiga dana yang ada di sekolah maka semakin baik pula mutu yang di hasilkan. Kerja sama dari ketiga dana tersebut dapat bersama sama berupaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 10 Bandarlampung.

2. **Pengaruh Implementasi Kebijakan Dana Komite Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 10 Bandarlampung**

Sehubungan dari hasil pengujian yang dilakukan bahwa penerapan kebijakan penggunaan dana komite berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMAN 10 Bandarlampung yaitu t hitung > t tabel. Sehingga hipotesis ke 2 yang di ajukan di terima karena terbukti secara parsial implementasi kebijakan dana komite ber-

pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan kebijakan yang dilakukan pada dana komite maka akan semakin meningkat mutu pendidikan di sekolah. Ini menjelaskan bahwa artinya semakin baik implementasi kebijakan komite di SMAN 10 Bandar Lampung telah mampu menerapkan sistem kebijakan terhadap mutu yang lebih baik.

3. Pengaruh Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 10 Bandar Lampung

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dana bantuan operasional sekolah nasional (BOSNAS) ini juga berpengaruh terhadap mutu pendidikan ini di buktikan dengan hasil pengujian parsial yang peneliti lakukan. Dengan t hitung $> t$ tabel maka dapat di tarik kesimpulan hipotesis ke 3 diterima yaitu terdapat pengaruh antara dana BOSNAS terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMAN 10 Bandar Lampung

Hal ini mengartikan semakin baik implementasi dana bantuan operasional sekolah maka semakin baik pula pengelolaan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Semakin banyak siswa dan berkurangnya siswa putus sekolah maka semakin tinggi pula penerimaan dana bantuan operasional sekolah untuk menunjang terlaksananya mutu pendidikan yang lebih baik.

4. Pengaruh Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 10 Bandar Lampung

Berdasarkan hasil analisis data statistik dapat diperoleh bahwasanya dana bantuan operasional sekolah daerah yang dihitung dengan uji t memiliki signifikansi $0,006 < 0,05$. Dengan nilai t -hitung $< t$ -tabel yaitu $2,790 < 1,663$, maka hipotesis ke 4 di terima artinya secara parsial variabel dana bantuan operasional sekolah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak siswa maka semakin tinggi penerimaan dana bantuan operasional sekolah daerah. Semakin berkurang

nya siswa putus sekolah maka semakin baik mutu pendidikan di SMAN 10 Bandar Lampung. Implementasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah daerah di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para siswa dapat mendapatkan pendidikan dengan baik tanpa adanya perbedaan apa pun.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan program SPSS versi 22 maka kesimpulannya adalah:

1. Dari uji simultan (uji F) yang dilakukan antara dana komite (X1), dana bantuan operasional sekolah nasional (BOSNAS) (X2) dan dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) (X3) terhadap peningkatan mutu pendidikan (Y) di SMAN 10 Bandar Lampung berpengaruh positif yang signifikan.
2. Secara parsial antara masing – masing variabel independen Implementasi Kebijakan dana komite, bantuan operasional sekolah nasional (BOSNAS) dan dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) terhadap variabel dependen yaitu peningkatan mutu pendidikan di SMAN 10 Bandar Lampung berpengaruh positif yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Baharun, Hasan.2017 *Manajemen Mutu Pendidikan* Tulungagung: Akademia Pustaka

Indonesia. Pergub nomor 34 tahun 2020 tentang *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Prov. Lampung*. Pemerintah Daerah. Lampung

Kemdikbud.2021 *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* Jakarta : Kemdikbud

Sugiyono.2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung : Afabeta

<https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan%20PP%20Nomor%2057%20Tahun%202021.pdf>
Di akses pada tanggal 02 April 2022 Pukul 10.00 WIB

<https://smandasabdl.id/category/uncategorized/> Di akses pada tanggal 26 Maret 2022 Pukul 13.04 WIB